

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



www.dispkh.riau.go.id



Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



[dispkhriau](https://www.instagram.com/dispkhriau)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 02 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, 02 Maret 2023

KEPALA DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE.MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 199503 1 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah berhasil dicapai. Dari tiga Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian indikator angka produksi daging ruminansia lokal dikategorikan sangat tinggi dengan capaian kinerja 123,35%, capaian indikator persentase status kesehatan hewan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase 98,24% dan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dengan capaian 86,4%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

1. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah lambatnya pertumbuhan populasi ternak karena angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah adanya wabah penyakit menular seperti LSD dan PMK yang menyebabkan terhalangnya pemasukan ternak daerah lain yang membuat ternak lokal lebih banyak dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
2. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
3. Permasalahan utama dalam pemenuhan produk pangan yang ASUH adalah masih minimnya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis NKV karena kurangnya kesadaran pelaku usaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Sarana dan Prasarana	7
1.5. Fungsi dan Tugas	8
1.6. Aspek Strategis Organisasi	11
1.7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	12
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	21
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	23
2.4. Instrumen Pendukung	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	27
3.2. Realisasi Anggaran.....	66
BAB IV. PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran Tindak Lanjut	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang)	6
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 (orang)	6
Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 (orang).....	7
Tabel 1.6. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	8
Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau	14
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024	18
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.....	18
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	20
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau	22
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022	29
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 Dan 2021	30
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra	32

Tabel 3.5. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)	33
Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi	36
Tabel 3.7. Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42
Tabel 3.8. Pelayanan Kesehatan Hewan	46
Tabel 3.9. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran	52
Tabel 3.10. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis ke-1.....	55
Tabel 3.12. Program/Kegiatan yang mendukung terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sasaran strategis ke-2).....	60
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022	66
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang)	6
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada masing-masing Bidang/UPT	6
Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu	7
Gambar 2.1. Tampilan aplikasi ISIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan.....	24
Gambar 2.2. Tampilan Isikhnas di layar komputer	25
Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2020-2022.....	30
Gambar 3.2. Grafik Status Kesehatan Hewan Tahun 2020-2022.....	31
Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Ruminansia dan Unggas.....	34
Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminansia	35
Gambar 3.5. Grafik Populasi Ternak Unggas	35
Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH	63
Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum	63
Gambar 3.8. Pelaksanaan Penanggulangan Wabah LSD.....	64
Gambar 3.9. Pelaksanaan Penanggulangan Wabah PMK	65

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Fungsi dan Tugas
4. SDM Organisasi
5. Sarana Prasarana
6. Aspek Strategis Organisasi
7. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi
8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan juga Rencana Strategis tahun 2019-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

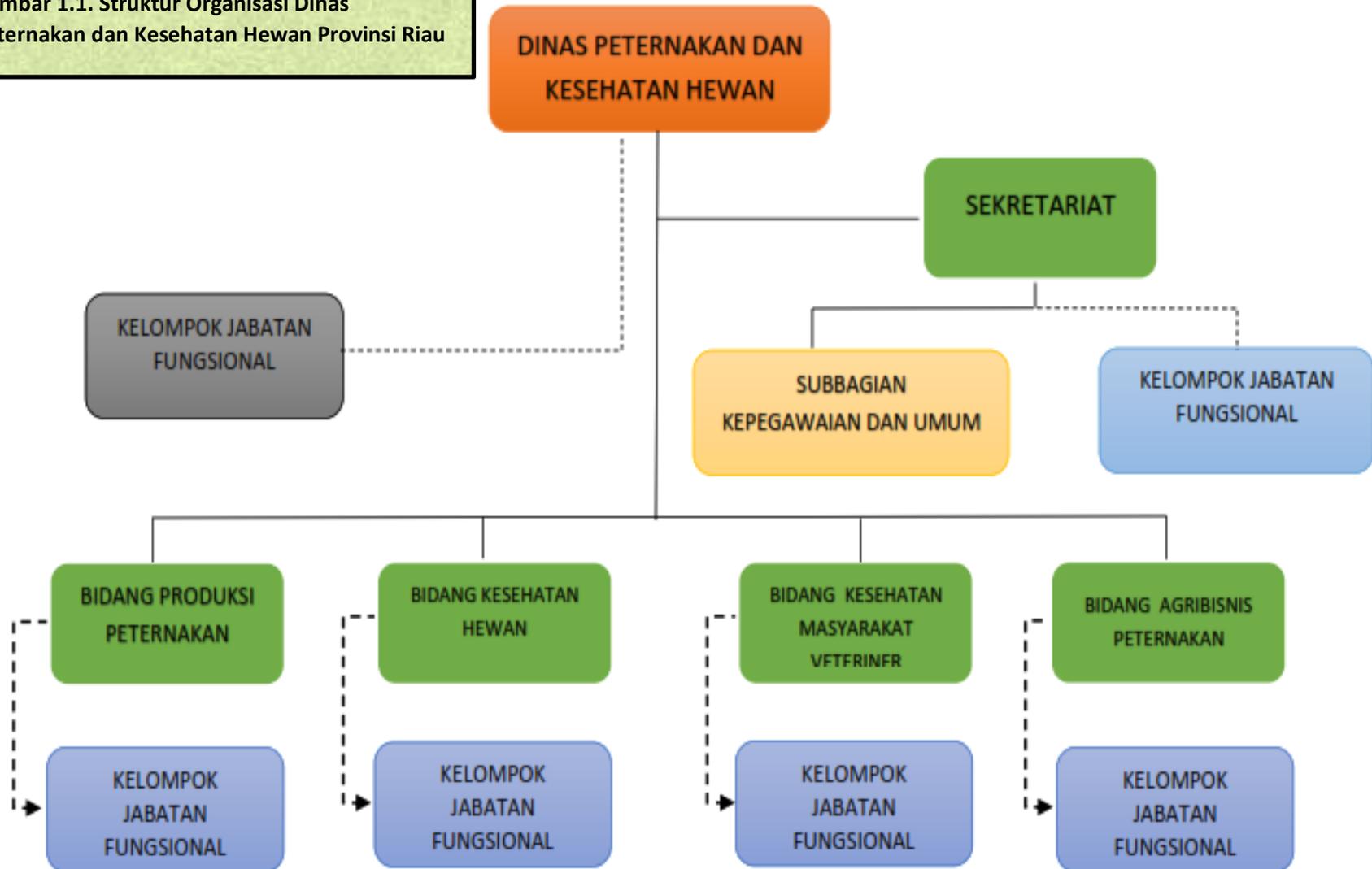
Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kalembeagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

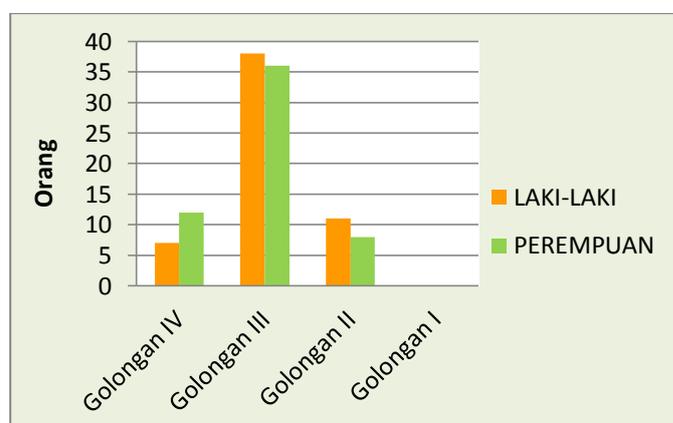


1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2022 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 223 orang yang terdiri dari 112 orang ASN dan 110 orang Non ASN. Rincian ASN terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 38 orang pejabat fungsional tertentu, 57 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 45 orang di Sekretariat dan Bidang, 66 orang di UPT. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

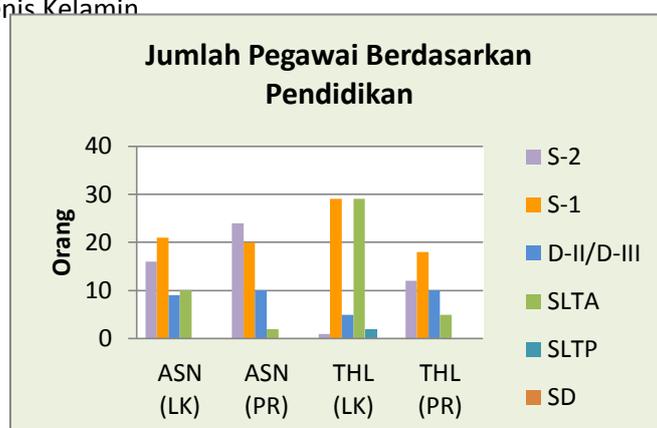
NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7	12	19
2	Golongan III	38	36	74
3	Golongan II	11	8	19
4	Golongan I	0	0	0
TOTAL		56	56	112



Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

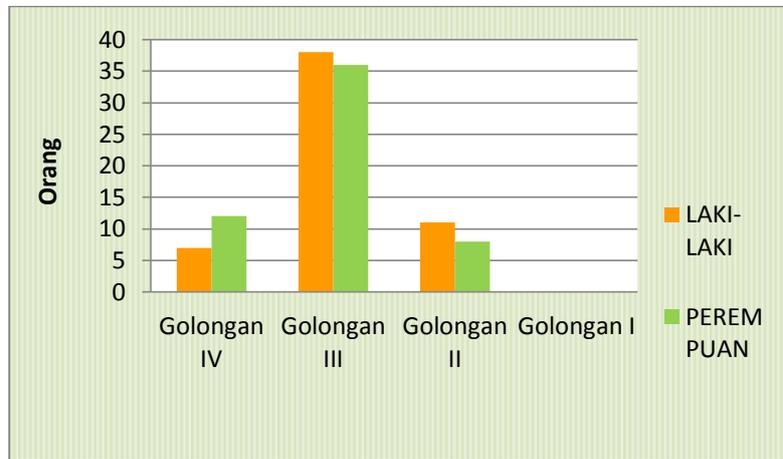
No	Pendidikan	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	S2	16	24	1	12	53
2	S1	21	20	29	18	88
3	D II/III	9	10	5	10	34
4	SLTA	10	2	29	5	46
5	SLTP	-	-	2	-	2
6	SD	-	-	-	-	-
Total		56	56	66	45	223



Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

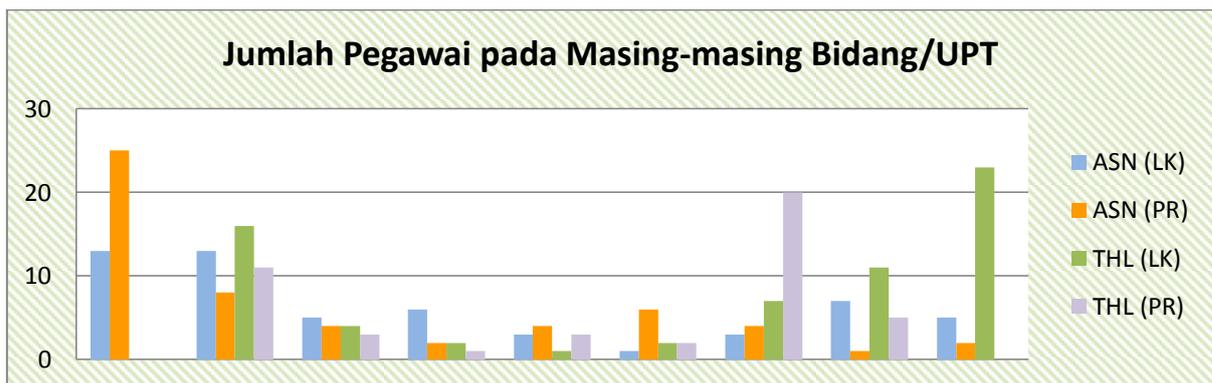
No	Golongan	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
1	Golongan IV	7	12	19
2	Golongan III	38	36	74
3	Golongan II	11	8	19
4	Golongan I	-	-	-
Total				112



Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 (Orang)

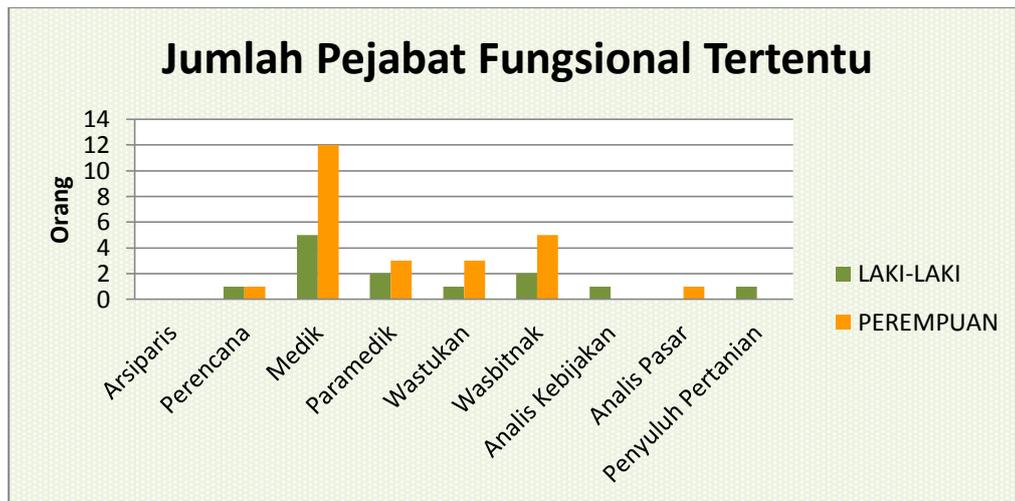
NO	BIDANG/UPT	ASN		THL		JUMLAH
		ASN (LK)	ASN (PR)	THL (LK)	THL (PR)	
1	FUNGSIONAL	13	25	0	0	38
2	SEKRETARIAT	13	8	16	11	48
3	PRODUKSI	5	4	4	3	16
4	AGRIBISNIS	6	2	2	1	11
5	KESWAN	3	4	1	3	11
6	KESMAVET	1	6	2	2	11
7	UPT. LVKH	3	4	7	20	34
8	UPT. IBT	7	1	11	5	24
9	UPT. PTP	5	2	23	0	30



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Tahun 2022 (Orang)

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0	0	0
2	Fungsional Perencana	1	1	2
3	Fungsional Medik	5	12	17
4	Fungsional Paramedik	2	3	5
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1	3	4
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	2	5	7
7	Fungsional Analis	1	0	1
8	Fungsional Penyuluh	0	1	1
Total		13	25	38



Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

1.4. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel.1.6. Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Gedung kantor	5	4	1
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	8	6	2
4	Bangunan Gedung Instalasi	5	5	
5	Gedung Pemetong Hewan Permanen	3	3	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	8	5	3
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk sapi	81	81	
18	Komputer PC	96	87	9
19	Note Book	24	12	12
13	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022

1.5. Fungsi dan Tugas

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan,

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Produksi Peternakan

Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak, dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Higiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan

Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan

berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang- undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Dari total produksi daging ruminansia di Provinsi Riau tahun 2021, produksi daging ruminansia lokal hanya sebesar 13%, selebihnya

merupakan daging yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau. Dan untuk memenuhi kebutuhan daging ruminansia disamping daging segar juga dipenuhi dari daging beku yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, *Good Farming Practice* tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas

lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab I berisi :

1. Rencana Strategis Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2021
4. Instrumen Pendukung

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan periode 2014 – 2019, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan

organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)
		Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)
			Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan	1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan populasi ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kelahiran - Penyediaan Pakan Berkualitas - Penyediaan Bibit ternak berkualitas - Penyediaan indukan dan pejantan berkualitas

masyarakat		Pengembangan SDM dan kelembagaan peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Penyuluhan kepada Kelompok Peternak - Memfasilitasi permodalan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan
		Peningkatan prasarana peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana produksi peternakan - Menyediakan prasarana UPT
	2. Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penurunan angka kematian hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Veteriner - Pengamatan penyakit hewan - Pengawasan Peredaran Obat Hewan - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan - Pembinaan kelembagaan keswan
		2. Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Audit/Surveilance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan - Meningkatkan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2019-2024) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Bidang Pertanian sesuai Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021, khusus untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat dalam 4 program yaitu :
 - a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Penyuluhan Pertanian
- 2) Kegiatan Bidang Pertanian berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - b) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - c) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- d) Penataan Prasarana Pertanian
 - e) Penjaminan Kesehatan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebanyak 1 program dengan 4 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan :
- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara

Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun telah ditetapkan perjanjian kinerja namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kondisi pergantian atau mutasi pejabat atau perubahan alokasi, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 pada Bulan Juli tahun 2022, yang mana sasaran strategis dinas dan Indikator Kinerja Utama Dinas juga mengalami perubahan, maka perjanjian kinerja juga mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubenur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SASARAN STRATEGIS PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN	TARGET PERUBAHAN 2022
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.591,92 Ton	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	61.096 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	96,6%	Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	96,6%
					Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%

Pada tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 15 indikator kinerja kegiatan. Indikator dalam

Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

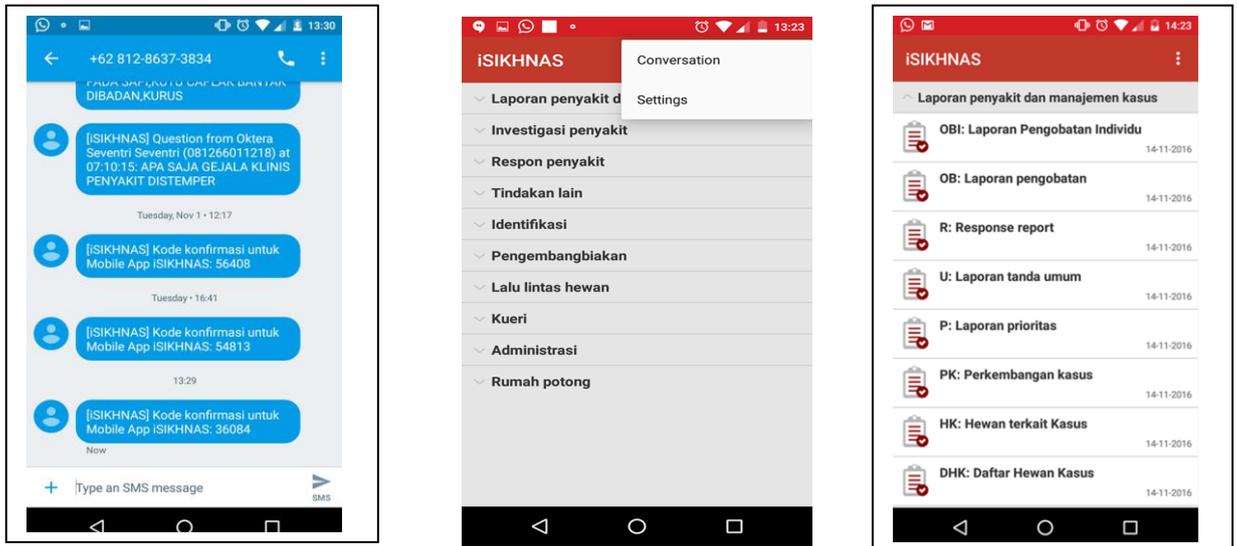
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 57.571.256.317,- melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp.65.535.471.000,-. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.5.549.963.000 ,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.13.945.003.000,-.

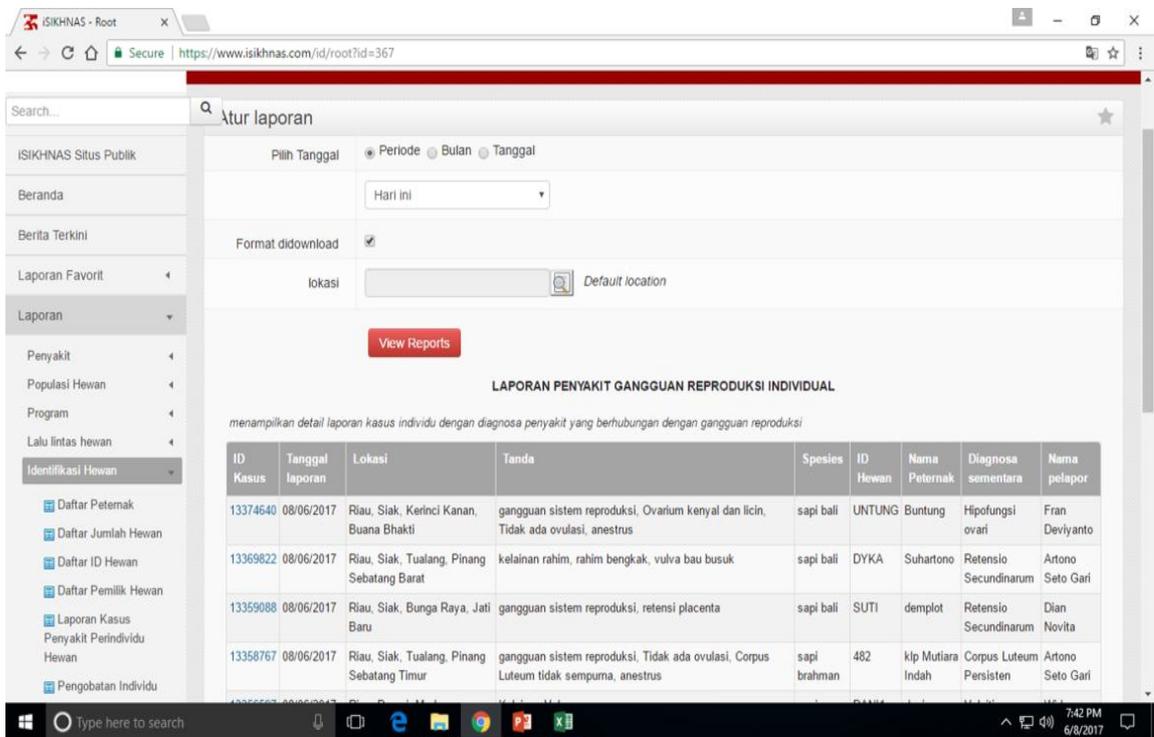
2.4. Instrumen Pendukung

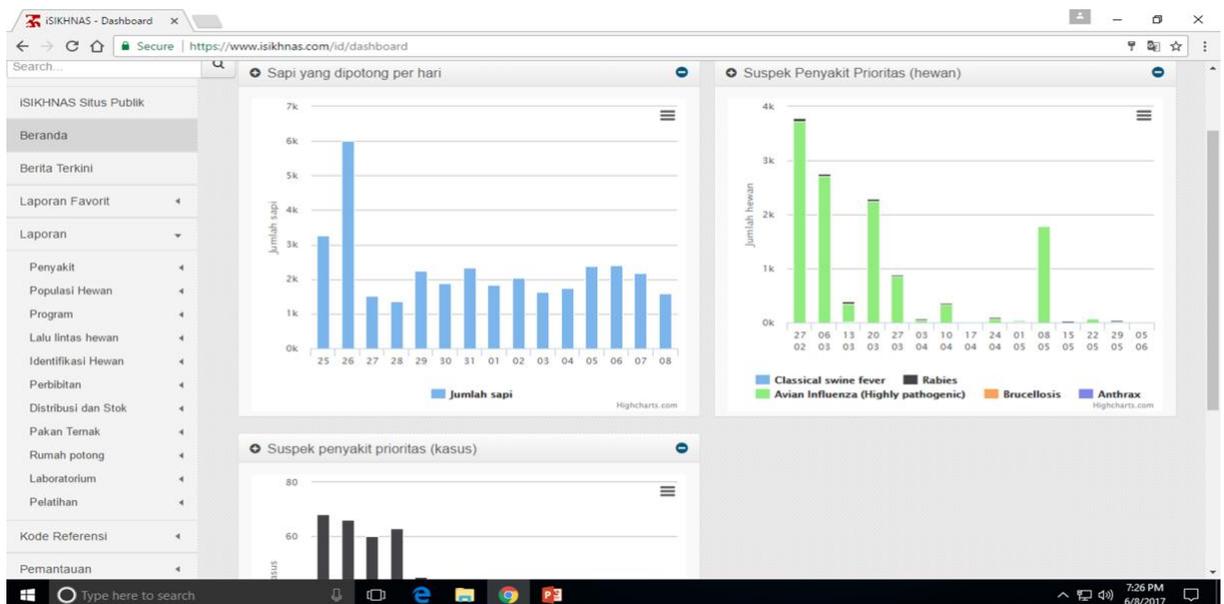
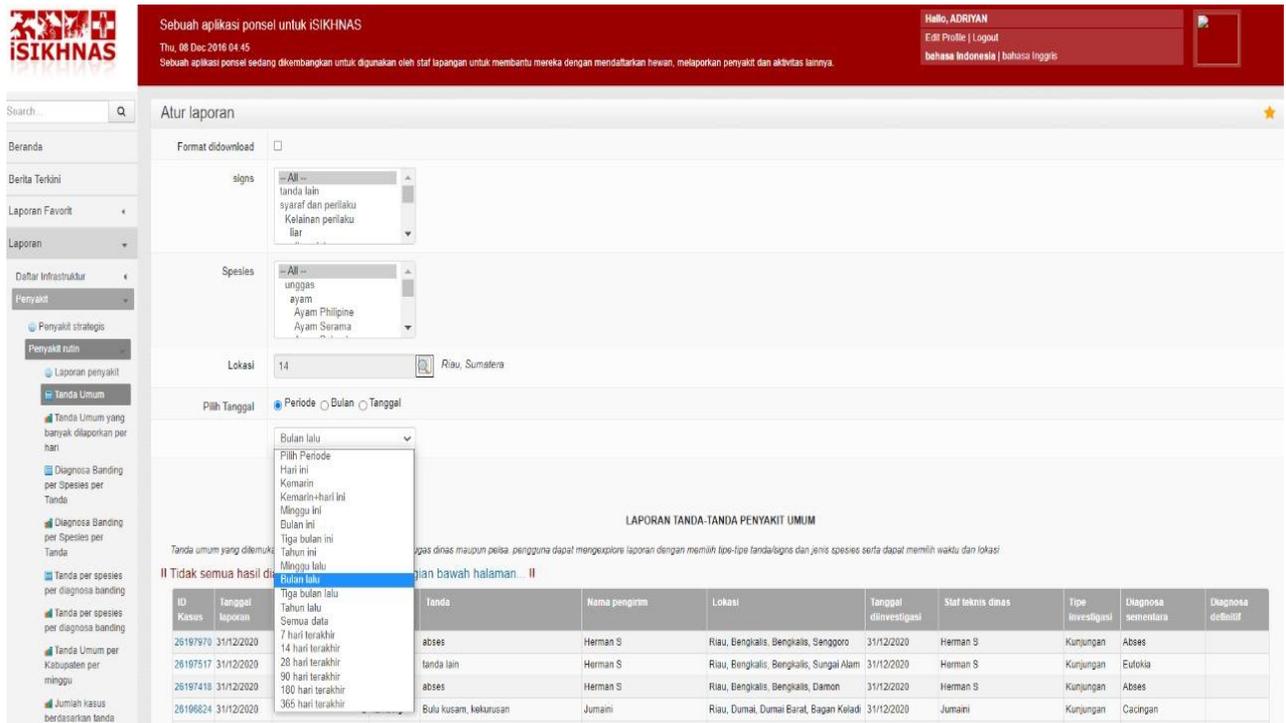
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi iSIKHNAS. ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari Petugas lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. iSIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam Petugas Lapangan yang melaporkan sewaktu selesai melakukan pelayanan dalam bentuk pengamatan, pengobatan, pelayanan inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran dan lain-lain. Data yang sudah dikirim dari HP Petugas Lapangan masuk ke system aplikasi iSIKHNAS dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan, yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Dengan menggunakan iSIKHNAS, kita akan dapat

menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu-lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.



Gambar 2.1. Tampilan aplikasi iSIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan





Gambar 2.2. Tampilan iSHIKHNAS di layar komputer

Disamping itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memanfaatkan aplikasi pendukung untuk monitoring dan evaluasi berupa Sistem Informasi Pengendalian (<http://monev.riau.go.id>), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau guna mendukung

efektifitas dari proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

3.1. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator Angka produksi daging ruminansia lokal, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator jumlah persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

3.1.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Pada indikator kinerja produksi daging dihitung dari penghitungan jumlah pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras) dikalikan dengan parameter berat karkas masing-masing ternak tersebut.

Sedangkan Untuk mengukur sasaran Strategis II yakni Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan diukur dengan rumus populasi dikurangi jumlah hewan sakit dibagi populasi dikali seratus persen. Sedangkan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) diukur dengan menghitung jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dibagi jumlah produk pangan asal hewan yang beredar di kali seratus persen.

Capain Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	61.096 Ton	75.364 Ton*	123.35%	Sangat Tinggi
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	96,6%	94,9%	98,24%	Sangat Tinggi
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	4,32%	86,4%	Tinggi

*Angka Sementara

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Produksi Daging menunjukkan bahwa produksi daging pada tahun 2022 adalah sebesar 75.364 Ton dengan capaian realisasi kinerjanya sudah melebihi target dengan tingkat capaian 123.35% kategori Sangat Tinggi. Produksi daging ini merupakan hasil verifikasi dan validasi data Tingkat Provinsi Riau Ta. 2023. Semua jenis ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Buras dan Ayam Ras Pedaging) produksi dagingnya mengalami peningkatan kecuali produksi kerbau mengalami penurunan.

Pada sasaran strategis II : Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan, realisasinya 94,9% dengan tingkat capaian kinerjanya 98,24% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi. Untuk indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH), realisasinya 4,32% dengan tingkat capaian 86,4% dengan kategori capaian tinggi.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2020 dan 2021

Realisasi tahun 2021 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI-SI 2020	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2021	REALISASI-SI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	58.751 Ton	58.751 Ton	100%	59.912 Ton	65.408 Ton	109,17%	61.096 Ton	75.364 Ton*	123,35 %
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	95,2	94,10	98,84%	95,9%	94,10%	98,12%	96,6%	94,9%	98,24%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	-	-	-	-	-	-	5%	4,32%	86,4%

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa capaian kinerja produksi daging tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan produksi daging dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 13,28.



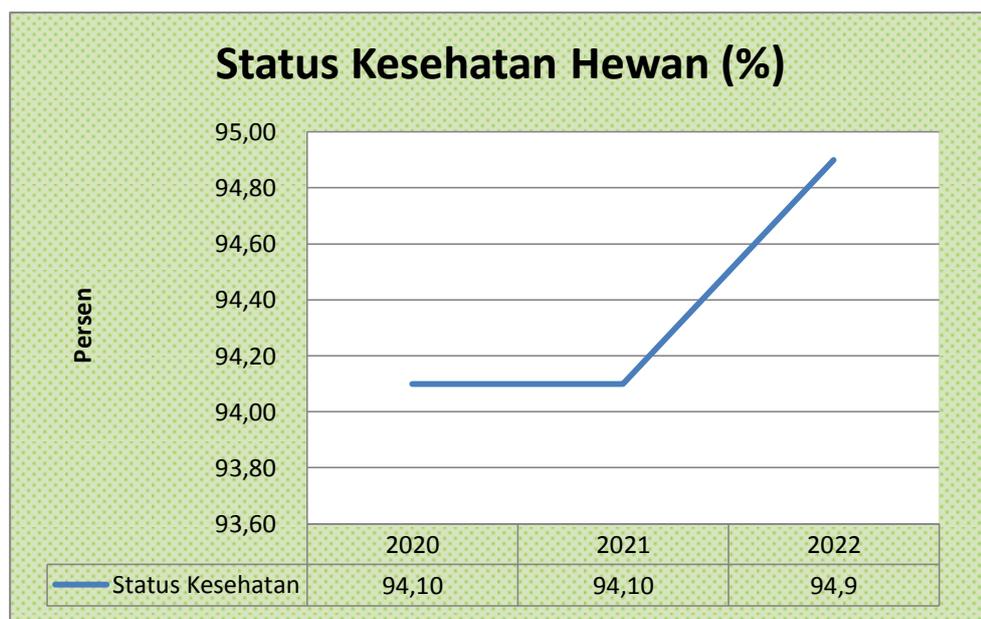
Gambar 3.1. Produksi daging Tahun 2020-2022

Tahun 2022 produksi daging meningkat 15,22% dari tahun 2021. Produksi daging berkaitan dengan permintaan pasar. Semakin besar permintaan pasar maka semakin banyak ternak yang di potong. Peningkatan permintaan daging ini

berkaitan erat dengan semakin turunnya wabah Covid19 dibanding tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 kasus Covid19 semakin turun, maka banyak masyarakat yang mulai mengadakan acara pesta dan akikah serta semakin berkurangnya pembatasan kegiatan pada perayaan hari besar keagamaan menyebabkan permintaan akan daging semakin meningkat.

Pada tahun 2022 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.445 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah lahir sebanyak 22.088 ekor ternak sapi.

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 94,9% mengalami kenaikan dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,8%.



Gambar 3.2. Grafik Status Kesehatan Hewan Tahun 2020-2022

Sulitnya meningkatkan status kesehatan hewan walaupun berbagai upaya dan kegiatan telah dilakukan adalah disebabkan adanya wabah penyakit LSD dan Wabah PMK yang menyerang ternak pada tahun 2022. Namun kinerja ini sudah tergolong bagus karena ditengah munculnya wabah penyakit LSD dan PMK, Provinsi Riau mampu meningkatkan persentase status kesehatan hewan walaupun hanya 0,8% dan dikatakan kinerja bagus karena disaat terserang

wabah penyakit menular, Provinsi Riau mampu menekan jumlah hewan yang sakit dengan vaksinasi sehingga status kesehatan hewan menjadi meningkat. Sedangkan pada indikator persentase produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) capaian kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja utama yang baru setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hwan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2024. Capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal dan persentase status Kesehatan hewan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	63.635 Ton	75.364 Ton	118.43%
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	98%	94,9%	96,83%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	4,32%	86,4%

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian renstra untuk indikator produksi daging adalah sebesar 118.43% sampai dengan tahun 2022, sudah melebihi target akhir Renstra. sedangkan untuk indikator status kesehatan hewan capaian realisasi Renstra 96,83%. Pada indikator Persentase Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) capaian tahun 2022 terhadap target akhir renstra adalah sebesar 86,4%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau optimis akan dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya

mengingat tahun 2022 merupakan tahun ketiga penerapan Renstra periode 2019-2024 sehingga masih ada waktu maksimal 2 tahun lagi untuk mencapai target akhir renstra.

Indikator produksi daging dan persentase produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tidak dapat dibandingkan dengan target nasional karena target nasional merupakan agregat dari seluruh provinsi di Indonesia. Disamping itu untuk produksi daging, target nasional melingkup semua jenis ternak sedangkan target Provinsi Riau hanya menghitung produksi daging dari Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Buras dan Ayam Ras Pedaging.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

A. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Produksi Daging

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Capaian target produksi daging pada tahun 2022 sesuai tabel 3.2 adalah sebesar 123.35%. Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra dan Perjanjian Kinerja. Produksi daging yang dihitung adalah daging Sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging dan ayam buras.

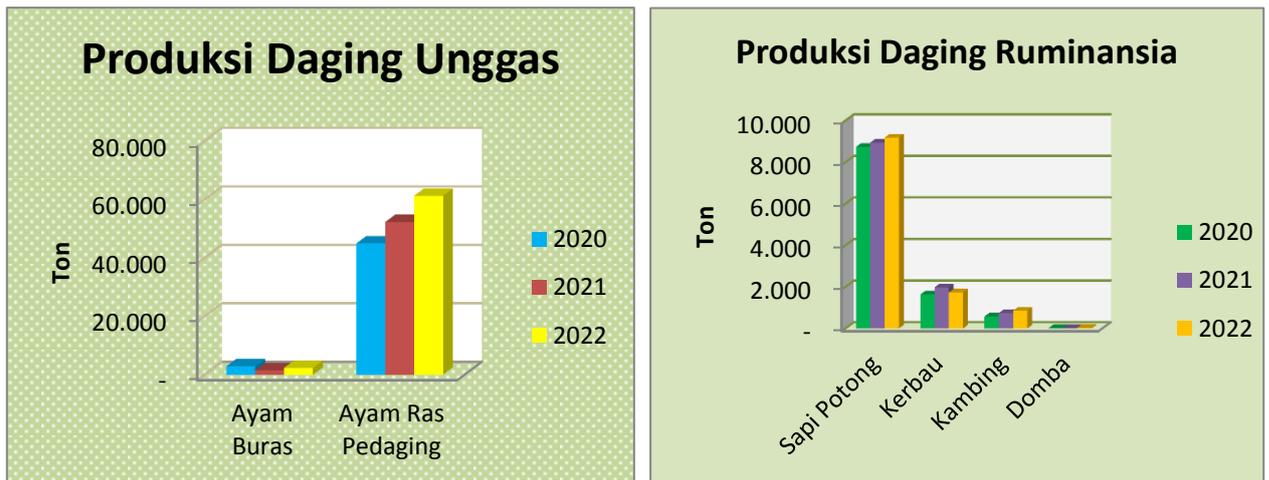
Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 produksi terus mengalami peningkatan dan tahun 2022 target produksi daging dapat terpenuhi bahkan melebihi target hingga mencapai 123.35%.

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut.

Tabel.3.5. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)

Jenis Ternak	2020	2021	2022*
Sapi Potong	8.737.301	8.948.696	9.182.778
Kerbau	1.631.055	1.978.715	1.731.996
Kambing	578.579	741.404	847.639
Domba	19.879	15.583	32.723
Ayam Buras	2.869.213	1.481.144	2.353.334
Ayam Ras Pedaging	44.915.106	52.242.136	61.214.925
Jumlah	58.751.133	65.407.678	75.363.365

*Angka Sementara

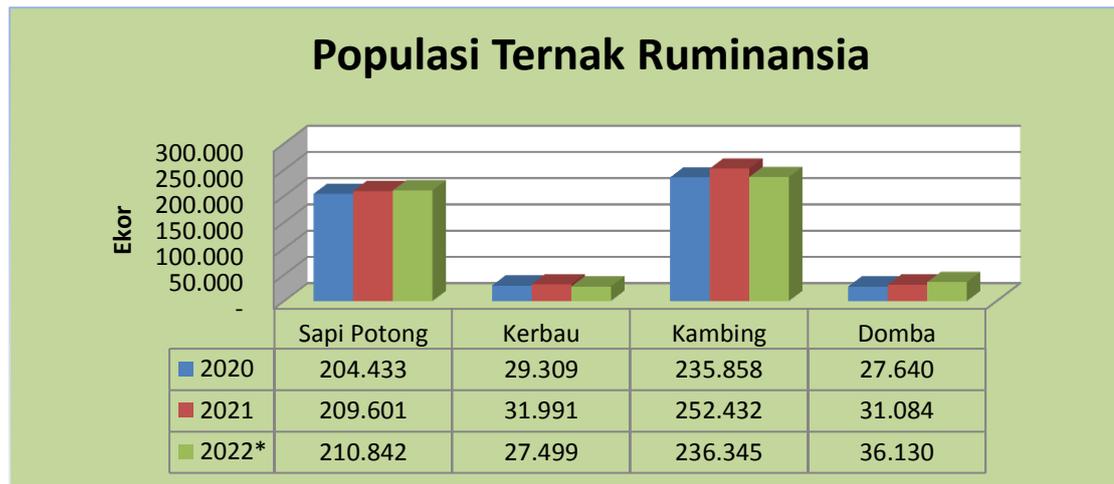


Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Ruminansia dan Unggas

Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa produksi daging Tahun 2022 di Riau sebanyak 75.363.365 kg atau 75.363 Ton. Produksi daging ruminansia yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba sebanyak 11.795 Ton. Sementara berdasarkan Tabel 3.2. Produksi daging ruminansia lokal sebanyak 2.489 Ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau baru bisa memenuhi produksi daging ruminansia lokal sekitar 24.41% dari total produksi daging ruminansia, selebihnya merupakan produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

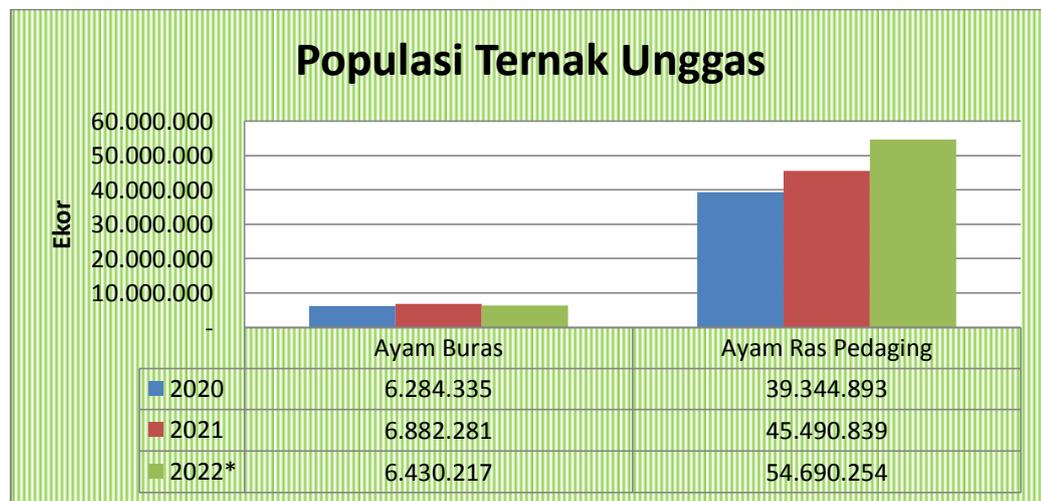
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



*Angka Sementara

Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminansia



*Angka Sementara

Gambar 3.5. Grafik Populasi Ternak Unggas

Dari gambar 3.3. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Namun pada tahun 2022, populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak kerbau dan kambing. Berdasarkan angka sementara Tahun 2022, Populasi Sapi tahun 2021 dari 209.601 ekor meningkat menjadi 210.842 ekor pada tahun 2022. Populasi kerbau tahun 2021 31.991 ekor turun menjadi 27.449 ekor pada tahun 2022. Populasi kambing tahun 2021 sebanyak 252.432 ekor menurun menjadi 236.345 ekor pada tahun 2022 dan populasi domba meningkat pada tahun 2022 menjadi 36.130 ekor dari sebelumnya 31.084 ekor.

Pada ternak unggas, populasi ayam buras mengalami penurunan populasi dari 6.882.281 ekor pada tahun 2021 menjadi 6.430.217 ekor pada tahun 2022,

sedangkan populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 45.490.839 ekor pada tahun 2021 menjadi 51.815.315 ekor pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.445 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah lahir sebanyak 22.088 ekor atau dengan tingkat capaian 80,48% dari target. Pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2023.

Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi (Ekor)

No	Kabupaten	Target Akseptor IB	Capaian Akseptor IB	%	Target Bunting	Capaian Bunting	%	Target Lahir	Capaian Lahir	%
1	Kuantan Singingi	6.000	6.218	103,63%	5.124	2.936	57,30%	3.828	3.705	96,79%
2	Indragiri Hulu	6.600	6.197	93,89%	5.268	2.434	46,20%	4.214	3.171	75,25%
3	Indragiri Hilir	800	1.152	144,00%	754	152	20,17%	565	368	65,11%
4	Pelalawan	1.500	817	54,47%	1.450	285	19,66%	1.090	259	23,76%
5	Siak	3.500	2.974	84,97%	3.800	1.946	51,21%	2.810	2.656	94,52%
6	Kampar	7.000	6.349	90,70%	8.619	4.920	57,08%	6.728	6.415	95,35%
7	Rokan Hulu	6.000	5.117	85,28%	6.001	3.579	59,64%	4.530	3.060	67,55%
8	Rokan Hilir	1.300	646	49,69%	1.350	267	19,78%	1.015	361	35,57%
9	Bengkalis	2.200	2.013	91,50%	2.020	1.191	58,96%	1.515	1.148	75,78%
10	Kep Meranti	150	128	85,33%	185	94	50,81%	140	52	37,14%
11	Pekanbaru	100	53	53,00%	70	8	11,43%	50	9	18,00%
12	Dumai	1.150	1.047	91,04%	1.285	545	42,41%	960	884	92,08%
JUMLAH		36.300	32.711	90,11%	35.926	18.357	51,10%	27.445	22.088	80,48%

Sumber Data : iSIKHNAS 2022, data diolah

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 36.300 ekor. Dari target 36.300 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 32.711 ekor sapi. Dan dari 32.711 ekor sapi yang di IB yang telah berhasil bunting selama tahun 2022 sebanyak 18.357 ekor. Selama tahun 2022 ditargetkan akan lahir 27.445 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan terget dari sebagaimana hasil IB tahun 2021 dan sebagian hasil IB tahun 2022. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2022 merupakan hasil IB tahun 2022 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2021. Dari 27.445 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebanyak 22.088 ekor, selebihnya ternak yang saat ini bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2023.

Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung dari anggaran APBD Riau dan dari APBN dalam bentuk *sharing budget* untuk pembelian semen beku, Fasilitas alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair, Operasioanal N2 Cair, operasional IB, Operasional Pemeriksaan Kebuntingan, Operasional Kelahiran, Pembelian hormon dan vitamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya. Selain dampak terhadap investasi, pelaksanaan IB juga memberikan dampak lain seperti: peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan populasi melalui IB diantaranya jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas IB untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB. Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.

Keberhasilan kebuntingan baik yang dari inseminasi buatan maupun kawin alam tidak terlepas juga dari pemenuhan pakan ternak yang berkualitas.

Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk dapat bunting dan melahirkan. Hal ini terkait juga dengan pengetahuan peternak yang masih minim tentang pakan ternak yang berkualitas dan keterbatasan modal peternak untuk membeli pakan ternak yang berkualitas.

Dalam mengukur kinerja program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian peningkatan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi iSHIKHNAS yang datanya realtime dilaporkan oleh Petugas Lapangan. Berbagai data dari hasil pelaporan Petugas Lapangan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang mendukung kebijakan dan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya aplikasi iSHIKHNAS, data jumlah ternak yang di IB, data ternak yang bunting, data jumlah populasi, data pemotongan ternak yang berkaitan langsung dengan produksi daging serta data lainnya yang berkaitan dengan peternakan dan Kesehatan hewan yang dilaporkan oleh Petugas, dapat di akses kapan saja dan data terupdate setiap saat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.

Dalam menghadapi kendala peningkatan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak

- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotivasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS.

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.

- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.
- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan sapi potong di lahan perusahaan perkebunan sawit melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk meningkatkan populasi sapi potong sehingga ketersediaan daging sapi lokal di Riau dapat terpenuhi

B. Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dari Tabel 3.2. dapat diketahui pada capaian Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2022 adalah sebesar 94,9% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,24%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi namun belum mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target persentase status kesehatan hewan yaitu posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai, sehingga rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Pada awal tahun 2022, Provinsi Riau dihadapi oleh wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 242/KPTS/PK.320/M/2022, tanggal 2 Maret 2022 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan Keputusan

Menteri Pertanian Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022, tanggal : 25 Juni 2022. Penyakit LSD dan PMK merupakan penyakit eksotik yang sebelumnya belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah. Penyakit ini mulai mewabah karena letak Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Infuenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog

Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi.

Tabel 3.7. Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Jumlah Hewan Penular Rabies (HPR) yang divaksinasi	17.800 ekor	11.505 ekor
2	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Puskesmas	8 kabupaten/ kota	8 kabupaten/ kota
3	Jumlah sapi bali yang divaksinasi	11.700 ekor	11.482 ekor
4	Jumlah ternak babi yang diobati	6.000 dosis	6.000 dosis
5	Jumlah ternak yang dilayani	36.000 ekor	55.381 ekor
6	Jumlah satuan ternak yang diawasi di Pos Check Poin	65.211 satuan ternak	16.683 satuan ternak
7	Jumlah vaksinasi LSD	49.775 dosis	35.894 dosis
8	Jumlah vaksinasi PMK	203.406 dosis	142.033 dosis

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa Jumlah HPR yang divaksinasi tidak mencapai target dikarenakan banyaknya anjing liar yang tidak berpedang sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan vaksinasi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi sapi bali yang divaksinasi tahun 2022 sebanyak 11.482 ekor dari target vaksinasi 11.700 ekor. Target vaksinasi tidak tercapai dikarenakan wabah LSD dan PMK di Provinsi Riau, petugas pada saat bersamaan juga sedang melaksanakan vaksinasi PMK dan LSD.

Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Penyebab tidak terealisasinya jumlah satuan ternak yang diawasi di Pos Check Poin (26%) karena dengan adanya wabah LSD dan PMK dilakukan pembatasan ternak keluar dan masuk ke Provinsi Riau. Selain itu, adanya Surat Edaran Satgas PMK tentang lalu lintas Hewan Rentan PMK yang beberapa kali mengalami penyesuaian dalam persyaratan juga mempengaruhi jumlah hewan yang dilalu lintaskan.

Wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD). LSD merupakan salah satu penyakit eksotik yang belum pernah dilaporkan di Indonesia. Penyakit LSD disebabkan oleh virus dari famili Poxviridae yang menyebabkan lesi/kerusakan pada kulit dan/atau kematian akibat infeksi sekunder pada ruminasia spesifik pada sapi dan kerbau. LSD memiliki dampak kerugian ekonomi yang cukup besar diantaranya penurunan berat badan, produksi susu, dan dapat menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi jantan maupun betina.

Berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner Bukittinggi, Hasil Uji Laboratorium Nomor : 15001/PK.310/F4B.1/02/2022, tanggal 15 Februari 2022, bahwa pada pemeriksaan PCR didapatkan 12 (dua belas) ekor sapi positif LSD dari 21 ekor yang diperiksa dan diambil sampel dengan gejala Benjol-Benjol Kulit (BBK) di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat penyakit ini sudah terkonfirmasi di Provinsi Riau, upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yaitu melaksanakan vaksinasi, melakukan pengobatan, pemberian vitamin, pengawasan lalu lintas ternak, melakukan KIE kepada petugas serta peternak di lapangan tentang informasi penyakit LSD, penerapan biosecurity dalam melaksanakan pelayanan ke kandang karena risiko penularan penyakit melalui petugas (pakaian, sepatu, dan peralatan), dan menggunakan alat medis sekali pakai untuk tiap ekor ternak yang dilayani. Selain itu, melakukan pelaporan di iSIKHNAS jika ditemukan adanya ternak yang menunjukkan gejala LSD.

Berdasarkan data rekapitulasi sindrom LSD tahun 2022, dilaporkan sebanyak 942 ekor hewan yang bergejala LSD dengan rincian sebagai berikut : Indragiri Hulu 322 ekor, Pelalawan 57 ekor, Kampar 17 ekor, Dumai 88 ekor, Bengkalis 179 ekor, Indragiri Hilir 110 ekor, Siak 105 ekor, Rokan Hulu 44 ekor, Pekanbaru 1 ekor, dan Kuantan Singingi 9 ekor.

Pada Tahun 2022 Provinsi Riau mengadakan sebanyak 49.775 dosis bersumber dari Pusat. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan program vaksinasi di wilayah tertular dan beresiko tinggi LSD.

Berdasarkan laporan yang diterima capaian realisasi vaksinasi LSD yang diperoleh dari iSIKHNAS pada tahun 2022 sebanyak 35.894 dosis, atau sekitar 40% dari 86.230 ekor target populasi sapi yang ada di Provinsi Riau. Realisasi belum mencapai 100% dari populasi sapi. Hal ini dikarenakan adanya wabah

PMK yang terjadi sejalan dengan wabah LSD. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia (petugas) dalam melakukan vaksinasi, system pemeliharaan ternak yang semi intensif menyulitkan untuk mengumpulkan ternak di waktu bersamaan, dan kurangnya kesiapan tim dalam membuat strategi pencapaian vaksinasi.

Penyakit lain yang mewabah di Provinsi Riau dan hampir di seluruh Indonesia TERMASUK Provinsi Riau adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Penyakit mulut dan kuku (PMK) juga dikenal sebagai *Foot and Mouth Disease* (FMD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga *Picornaviridae*, genus *Aphovirus* yakni *Aphtae epizooticae*. Masa inkubasi dari penyakit 1-14 hari yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan ini bisa mencapai 100% dan angka kematian tinggi ada pada hewan muda atau anak-anak. Tingkat penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) cukup tinggi, tetapi tingkat kematian hanya 1,5%.

Pada tahun 2022, Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah wabah PMK berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022, tanggal : 25 Juni 2022. Adapun kasus PMK pertama dilaporkan di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Rambah Hiilir, Kabupaten Rokan Hulu. Laporan kabupaten/kota serta hasil pengujian Balai Veteriner Bukittinggi telah mengkonfirmasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Riau di 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Riau, hanya ssatu Kabupaten yani Kepulauan Meranti yang merupakan daerah bebas PMK.

Berdasarkan rekapitulasi laporan sindrom PMK per 19 Mei s.d 31 Desember 2022 terdapat 4.922 kasus yang dilaporkan dengan rincian Rokan Hulu 1.053 kasus, Siak 67 kasus, Indragiri Hilir 33 kasus, Kampar 12 kasus, Bengkalis 22 kasus, Indragiri Hulu 154 kasus, Pelalawan 144 kasus, dan Dumai 8 kasus. Jumlah hewan mati akibat PMK sebesar 32 ekor dengan rincian Rokan Hulu 2 ekor, Siak 5 ekor, Indragiri Hilir 4 ekor, Kampar 8 ekor, Indragiri Hulu 11 ekor, dan Kuantan Singingi 2 ekor. Jumlah hewan potong paksa sebesar 33 ekor dengan rincian Rokan Hulu 9 ekor, Siak 5 ekor, Bengkalis 4 ekor, Indragiri Hulu 11 ekor, dan Kuantan Singingi 4 ekor. Jumlah hewan sembuh sebesar 4.857

ekor dengan rincian Rokan Hulu 1.042 ekor, Siak 487 ekor, Indragiri Hilir 264 ekor, Kampar 33 ekor, Bengkalis 238 ekor, Indragiri Hulu 702 ekor, Pelalawan 527 ekor, Kuantan Singingi 1.544 ekor, dan Dumai 19 ekor. Setelah dilakukan pelayanan pengobatan dan vaksinasi berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2022 sudah tidak ditemukan kasus hewan sakit (bergejala PMK).

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan iSIKHNAS petugas dapat melaporkan secara realtime, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, iSIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pematangan, IB, Produksi, dan perbibitan.

Tabel. 3.8. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	49.296	35.366	45.722	55.381
2	Vaksinasi					
	a. Jembrana	Dosis	47,909	22,180	23.251	11.482
	b. Rabies	Dosis	40,385	36,858	19.173	11.505
	c. SE	Dosis	4,848	3,488	98	605
	d. LSD	Dosis	-	-	-	35.894
	e. PMK	Dosis	-	-	-	142.033
3	Penanggulangan Gangrep	Kasus	3.811	2.026	2.048	2.662
4	Pemeriksaan Laboratorium	Sampel	75,486	112,634	114.545	124.056

Sumber data : iSHIKHNAS 2022

Dari tabel.3.7 dapat dilihat bahwa tahun 2022 dalam rangka peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 55.381 ekor. Pelaksanaan Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae (SE) telah dilakukan dengan rincian 11.482 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 11.505 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing kera) , dan 605 dosis SE pada sapi dan kerbau.

Penanggulangan gangguan reproduksi yaitu kegiatan yang bertujuan menanggulangi gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau agar ternak dapat bereproduksi kembali. Selama 4 tahun terakhir telah ditangani sebanyak 10.547 kasus gangguan reproduksi dan khusus tahun 2022 telah dilaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi sebanyak 2.662 kasus.

Bila dicermati secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Penyakit LSD dan PMK merupakan penyakit eksotik yang sebelumnya belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah. Penyakit ini mulai mewabah karena letak Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara

luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.

- b. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan lain-lain berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- c. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- d. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.
- e. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan Tenaga medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota.
- f. Mengingat terjadinya penularan rabies pada daerah yang bebas, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pada pintu masuk (cek point) juga karena banyaknya peluang kemungkinan masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan petugas PPV di lapangan melalui SMS Gateway dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.

- b. Dalam upaya memenuhi jumlah dan kualitas petugas, diupayakan merekrut tenaga harian lepas baik dari pusat dan daerah serta melatih petugas yang ada dalam bidang teknis keswan
- c. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- e. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- f. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
- h. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskeswan, maka diupayakan peningkatan sarana puskeswan, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.
- i. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

C. Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator Persentase Produk Hewan Yang Aman, Sehat Utuh Dan Halal (ASUH)

Indikator persentase produk hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 3.2, capaian kinerja pada indikator Utama ini adalah sebesar 86,4% dari yang ditargetkan.

Produk pangan asal hewan berupa daging, susu, telur dan olahannya merupakan salah satu sumber protein hewani yang tidak tergantikan oleh bahan sintesis, produk pangan asal hewan juga merupakan bahan yang sangat mudah rusak (*perisable food*) dan berpotensi menjadi bahaya (*hazardous food*) bagi makhluk hidup dan lingkungan karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, **Pasal 58 (ayat 1)**, bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi Produk Hewan.

Pasal 58 (ayat 2), pengawasan, pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Pasal 60 (ayat 1,2) setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting, karena unit usaha merupakan titik awal penentuan kualitas produk hewan, maka penerapan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk harus dijalankan secara konsisten menurut aturan/standar operasional yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. NKV sebagai border utama pengawasan praktik hygiene sanitasi dan keamanan produk hewan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik nyata dilapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar higiene sanitasi dan penjaminan keamanan pangan yang benar, maka akan menimbulkan dampak atau resiko buruk bagi mutu dan keamanan produk serta kesehatan manusia dan lingkungan. Selain permasalahan penerapan teknis produksi, faktor biaya produksi serta nilai jual produk akan memicu praktik penyimpangan prinsip-prinsip kesmavet.

Bentuk penyimpangan kesmavet dalam hal penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan yang masih sering ditemukan yaitu proses penanganan karkas di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dilakukan di lantai atau melakukan pemotongan hewan tempat pemotongan hewan yang tidak resmi, penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging beku di pasar tradisional dengan tidak menggunakan sistem penyimpan dingin, pengawasan terhadap produk olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal dll), ketidak patuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis unit usaha dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan dan kasus penyimpangan kesmavet lainnya.

Upaya pemerintah provinsi dalam penjaminan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha adalah melalui sertifikasi kontrol veteriner/NKV, namun belum banyak unit usaha yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan NKV. Pemenuhan kebutuhan produk hewan sebagian besar dipenuhi dari luar

Provinsi Riau, sehingga usaha distributor produk hewan dan usaha ritel produk hewan semakin berkembang, sedangkan unit usaha di dalam daerah yang memproduksi produk hewan masih terbatas, terutama unit usaha Rumah Potong Hewan. Hingga saat ini seluruh RPH-R/RPH-U/RPH-B di Provinsi Riau belum **bersertifikasi NKV. Hal ini yang menyebabkan masih rendahnya persentase Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH di Provinsi Riau.**

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang ASUH adalah :

1. Pemetaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum bersinergi sehingga penjabaran program dan kegiatan belum sinkron antara provinsi dan daerah.
2. Advokasi penindakan hukum terhadap praktik penyimpangan kesmavet dalam mata rantai penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH belum terlaksana.
3. Keterbatasan SDM lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota.
4. Kesadaran pelaku unit usaha terhadap penerapan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu pangan serta penerapan kesejahteraan hewan masih belum merata disetiap unit usaha, faktor penyebab biaya produksi/operasional unit usaha yang tinggi, kebijakan manajemen usaha.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah :

1. Melakukan pemetaan program dan kegiatan antara provinsi dan daerah.
2. Mensosialisasikan proses advokasi regulasi terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terhadap seluruh *stakeholder*.
3. Mengoptimalkan peran masing-masing SDM yang tersedia sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk pembagian tugas kegiatan.
4. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kesadaran dan sosialisasi edukasi kepada stakeholder kesmavet, penguatan jejaring pengawasan lintas bidang.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel.3.9. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	61.096	75.364 Ton*	123,35 %	31.674.945.491	17.354.233.958	54,8%
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	96,6%	94,9%	98,24%	8.776.862.620	7.803.960.884	88,91%
		Persentase produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	4,32%	86,4%	277.646.240	205.652.780	74,07%

Dari Tabel 3.8. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging, capaian kinerjanya melebihi target sampai 123,35% dan penyerapan anggarannya hanya 54,8%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.

Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya status kesehatan hewan, capaian Kinerjanya tidak tercapai dengan tingkat capaian 98,24% dengan penggunaan anggaran 88,91% . Begitu juga pada indikator Persentase produk hewan yang ASUH capaian kinerja tidak tercapai hanya mencapai 86,4% dengan realisasi keuangan 74,07% sehingga belum bisa dikatakan efisien karena target kinerjanya tidak tercapai. Analisis efisiensi dilakukan bila capaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan penggunaan anggaran kurang dari anggaran yang tersedia.

Pada Tahun 2022, analisis efisiensi dapat dilakukan pada sasaran meningkatnya produksi daging dengan indikator produksi daging dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging	123.35%	54,8%	68,55 %

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatkan Produksi Daging sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging sebesar 123.35%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 54,8% dengan tingkat efisiensi mencapai 68,55%.

Pada indikator kinerja utama produksi daging didukung tiga program dan enam kegiatan. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain memiliki anggaran terbesar dengan pagu Rp. 23.139.649.715,- atau sekitar 73% dari total pagu anggaran 6 kegiatan yang mendukung peningkatan produksi daging melalui peningkatan populasi. Rendahnya realisasi keuangan pada program kegiatan yang mendukung peningkatan produksi daging adalah disebabkan adanya wabah LSD dan PMK sehingga penyediaan bibit ternak dari luar provinsi sulit terlaksana karena adanya aturan pelarangan lalulintas ternak. Sehingga pada kegiatan ini hanya bisa terealisasi pengadaan ternak sebanyak 490 ekor dari 1.883 ekor yang ditargetkan dengan realisasi keuangan hanya 40,47% (Tabel 3.10). Walaupun realisasi pengadaan ternak tidak mencapai target namun target produksi daging dapat tercapai bahkan melebihi target yg sudah ditetapkan. Dengan demikian kedepan untuk lebih efisien penggunaan anggaran, kegiatan pengadaan bibit ternak dapat dikurangi dan anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yang juga berperan dalam meningkatkan produksi daging namun tidak mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Seperti halnya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan bentuk kegiatan fokus pada inseminasi buatan yang dapat meningkatkan kelahiran ternak dimana pada tahun 2022 melalui kegiatan ini telah lahir 22.088 ekor anak sapi (Tabel 3.6).

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Produksi Daging

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja Produksi daging pencapaiannya ditunjang dari 3 (tiga) Program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	61.096	75.364	123,35	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	2,82	146,49	26.574.969.600	12.553.712.417	47,24
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2	2,0	100,00	67.940.000	47.615.250	70,08
						- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	1,0	100,00	67.940.000	47.615.250	70,08
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	720	631	87,63	1.744.195.315	1.650.670.478	94,64
						- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	1	1,0	100,00	1.744.195.315	1.650.670.478	94,64
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	12,95	10,52	81,23	1.623.184.570	1.490.278.994	91,81
						- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	12	12,0	100,00	1.518.459.570	1.410.104.994	92,86
						- Pengawasan peredaran dan Sertifikasi Benih/bibit ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	6	6,0	100,00	104.725.000	80.174.000	76,56

						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)/ST	1.883	490	26,02	23.139.649.715	9.365.147.695	40,47
						- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	1.883	490	26,02	23.139.649.715	9.365.147.695	40,47
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	5	5,0	100,00	2.691.336.429	2.439.871.783	90,66
						Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	5	5,0	100,00	2.691.336.429	2.439.871.783	90,66
						- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1,0	100,00	870.721.461	765.868.415	87,96
						- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	4	4,0	100,00	1.820.614.968	1.674.003.367	91,95
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	3	3,0	100,00	2.408.639.462	2.360.649.758	98,01
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	35	20,0	57,14	2.408.639.462	2.360.649.758	98,01
						- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok)	576	576,0	100,00	2.408.639.462	2.360.649.758	98,01

Dari Tabel 3.11. terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging, program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian.

Outcome yang diharapkan dari ketiga program ini adalah adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Inseminasi Buatan ataupun yang berasal dari kawin alam. Pada tahun 2022 terjadi penambahan kelahiran sapi sebanyak 22.088 ekor baik yang berasal dari Inseminasi Buatan maupun dari kawin Alam sebagai outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2022 capaian sasaran strategis angka produksi daging sudah mencapai target bahkan melebihi target mencapai 107,06%. Produksi daging dari tahun 2019 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Sub Kegiatan yang menunjang peningkatan produksi daging pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan capaian kinerja 100%, Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 87,63%, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak



dengan capaian 100%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian kinerja 100%,. Namun pada kegiatan Penyediaan benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain capaian kinerjanya sangat rendah dimana dari 1.883 ekor yang ditargetkan hanya 490 ekor yang dapat disediakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Hal ini karena adanya wabah Penyakit LSD dan PMK sehingga ternak yang akan didatangkan dari provinsi lain sulit masuk ke Provinsi Riau.

Pelaksanaan IB pada ternak



Sedangkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian seluruh Sub Keegiatannya mencapai target 100%, terdiri dari sub kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan capaian kinerja 100% dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya dengan capaian 100%.

Pada Program Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian capaian kinerjanya 57,14% dimana jumlah kelompok yang dinaikkan status kelompoknya hanya 20 kelompok dari 35 kelompok yang ditargetkan. Belum tercapainya target disebabkan sebagian kelompok peternak yang dibina menjadikan ternak sebagai tabungan bukan usaha pokok sehingga tidak fokus untuk mengembangkan kelompok. Disamping itu, kelompok peternak belum melihat keuntungan jelas dari status kelas kelompok, jadi kebanyakan tidak mau repot dalam melengkapi administrasi dan mengurus kelas kelompoknya sehingga untuk menaikkan kelas kelompok butuh waktu lebih lama. Disamping itu juga karena untuk menaikkan kelas, kelompok harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang sudah ditetapkan. Namun Petugas Lapangan tetap membina kelompok-kelompok peternak yang ada baik itu dalam hal membina budidaya ternak yang baik maupun dalam hal pengadministrasiannya ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani yang capaiannya 100% dimana kelompok petani yang mendapat penyuluhan sebanyak 576 kelompok sesuai dengan yang ditargetkan sehingga kedepannya diharapkan semakin banyak kelompok yang bisa dinaikkan kelasnya.

Secara umum kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi daging terlaksana dengan baik. Dengan capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada ketiga program tersebut memberi pengaruh yang besar pada outcome peningkatan populasi dan produksi daging. Namun pada tahun 2022 ini capaian program peningkatan populasi ternak tidak tercapai dimana seharusnya populasi meningkat tapi dengan adanya wabah LSD dan PMK menyebabkan ternak yang biasanya didatangkan untuk dipotong untuk pemenuhan kebutuhan daging tidak dapat masuk sehingga ternak lokal yang lebih banyak dipotong yang menyebabkan populasi ternak menjadi berkurang.

b. Program/Kegiatan yang mendukung peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Peningkatan Produk Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal.

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) didukung oleh Program capaian

Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat pada tabel berikut.



Pelayanan Medik di UPT LVKH

Tabel 3.12. Program/Kegiatan yang Mendukung Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sasaran Strategis Ke-2)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RELISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN				
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	96,60	94,90	98,24	0	1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	2,8	3,1	89,29	9.054.508.860	8.009.613.664	88,46				
							2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10	30,0	300,00							
							Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10	- 15,0				- 150,00	7.164.899.664	6.295.080.572	87,86
							- Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	36	36,0				100,00	7.164.899.664	6.295.080.572	87,86
							Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	70	59,0				84,29	537.140.316	493.215.794	91,82
							- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	44	44,0				100,00	137.140.316	107.559.294	78,43
							- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (Laporan)	60	60,0				100,00	400.000.000	385.656.500	96,41

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RELISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet				1.074.822.640	1.015.664.518	94,50
						- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetyeriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	250	324,0	129,60	1.074.822.640	1.015.664.518	94,50
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (%)	5,00	4,32	86,40	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	25	30,0	120,00	277.646.240	205.652.780	74,07
						- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan (Sertifikat)	48	52,0	108,33	138.909.720	79.792.500	57,44
							- Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	30	30,0	100,00	138.736.520	125.860.280

Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa dalam rangka Menjamin Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, didukung dengan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator angka kematian ternak dan persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk. Capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum memenuhi target dimana angka kematian ternak 3,1% sementara targetnya 2,8% sehingga capaian kinerjanya 89,29%. Sedangkan pada indikator persentase peningkatan unit usaha yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk capaian kinerjanya sangat tinggi dimana dari 10% peningkatan yang ditargetkan dapat terealisasi 30% peningkatan unit usaha yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk sehingga capaian kinerjanya 300%.

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, seluruh sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada kegiatan realisasinya jauh melebihi target. Sub kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian 129,6% dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan dengan capaian 108,3%. Dengan capaian kinerja program yang tinggi juga memberi pengaruh pada penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Disamping ke empat program di atas, sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga didukung oleh anggaran APBN yang terdiri dari tiga program sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan terdiri dari :
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan.
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak.
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

3. Program Dukungan Manajemen, dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

Semua kegiatan ini memiliki capaian kinerja 100% bahkan lebih.



Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH



Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum



Gambar 3.8. Pelaksanaan Penanggulangan Wabah LSD



Gambar 3.9. Pelaksanaan Penanggulangan Wabah PMK

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.65.535.471.000,-. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2022 memiliki 5 Program dengan 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp 49.596.331.538,- dan realisasi fisik 75,68%.

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022

	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	26.574.969.600	12.553.712.417	47,24%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.691.336.429	2.439.871.783	90,66%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.054.508.860	8.009.613.664	88,46%
4	Program Penyuluhan Pertanian	2.408.639.462	2.360.649.758	98,01%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.806.016.649	24.232.483.916,52	97,69%
	TOTAL	65.535.471.000	49.596.331.538	75,68%

Dari Tabel 3.13. dapat dilihat realisasi anggaran per program sebagai berikut :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah pagu Rp. 26.574.969.600,- dengan realisasi Rp. 12.553.712.417,- (47,24%)
- Program Penyuluhan Pertanian pagu Rp. 2.408.639.462,- dengan realisasi Rp.2.360.649.758,- (98,01%).
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pagu Rp. 2.691.336.429,- dengan realisasi Rp. 2.439.871.783,- (90,66%).
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu Rp.9.054.508.860,- dengan realisasi Rp.8.009.613.664,- (88,46%).

- e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 24.806.016.649,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.232.483.916,52,- (97,69%).

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Alokasi anggaran pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp.5.549.963.000,- (Lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Anggaran setelah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi Rp. 13.945.003.000,- (Tiga belas milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah). Realisasi keuangan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 12.967.177.492,- (dua belas milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh seratus tujuh puluh tujuh empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) atau 92,99%.

Tabel.3.14. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2022

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisi
		Rp	%	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS				
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	64.000.000	63.862.000	99,78	100
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	8.151.730.000	7.737.330.249	94,92	95
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	4.534.889.000	3.988.298.540	87,98	88
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	475.980.000	460.272.106	96,70	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEN				
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	508.404.000	507.921.797	99,91	100
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI				
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	210.000.000	209.492.800	99,79	100
Jumlah	13.945.003.000	12.967.177.492	92,99	98,40

BAB IV

PENUTUP

Bab III berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran Tindak Lanjut

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan tiga indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging dengan indikator produksi daging menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging 123,35%. Sasaran strategis terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja utama persentase status Kesehatan hewan menunjukkan capaian kinerja termasuk pada kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja 98,24%. Walaupun capaian kinerja sudah masuk pada kategori sangat tinggi tapi masih harus terus dilakukan peningkatan hingga capaian kinerja 100% atau bahkan lebih dari 100%. Pada indikator kinerja persentase produk pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tingkat capaian 86,4% belum mencapai target yang ditetapkan.

2. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah lambatnya pertumbuhan populasi ternak karena angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah adanya wabah penyakit menular seperti LSD dan PMK yang menyebabkan terhalangnya pemasukan ternak daerah lain yang membuat ternak lokal lebih banyak dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
3. Untuk efisiensi penggunaan anggaran, kegiatan pengadaan bibit ternak dapat dikurangi anggarannya dan anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yang juga berperan dalam meningkatkan produksi daging namun tidak mengeluarkan anggaran yang terlalu besar.
4. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
5. Permasalahan utama dalam pemenuhan produk pangan yang ASUH adalah masih minimnya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis NKV karena kurangnya kesadaran pelaku usaha.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Upaya/saran tindak lanjut yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.

2. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.